



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMMAD HADI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 438673

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 942.000.000**

1. Tanah Seluas 5376 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 9387 m2/180 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
4. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
6. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
7. Tanah Seluas 15000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 596.500.000**

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. LAINNYA, HONDA GENERATOR 5000 WAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000



4. MOBIL, TOYOTA HILUX PICKUP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
180.000.000
5. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.  
405.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 49.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 45.800.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.634.000.000

III. HUTANG Rp. 535.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.098.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.